

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan global pada tahun 2008 menjadi dasar pertimbangan kebijakan fiskal diberbagai negara terhadap keberlangsungan perekonomian. Terjadinya krisis menjadikan banyak negara yang menggunakan kebijakan moneter sebagai acuan dianggap kurang efektif dalam mengatasi dampak kerugian atas krisis keuangan global. Berbagai negara beralih menggunakan *policy fiscal* atau kebijakan fiskal ekspansif untuk mengatasi kerugian krisis keuangan global dan mendapat respon baik bagi sektor riil untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah diberbagai negara menggunakan kebijakan fiskal sebagai alternatif makroekonomi dalam melakukan intervensi kegiatan masyarakat di sektor riil. Surajningsih (2012) *policy fiskal* digunakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi dengan tujuan mempengaruhi *agregat demand* atau sisi permintaan dalam perekonomian dalam jangka panjang, kebijakan fiskal dalam ini dapat mempengaruhi *aggregate supply* atau penawaran agregat dalam jangka pendek yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian.

Menurut Fathurrahman (2012) kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk melakukan intervensi di bidang ekonomi terutama di sektor riil. Kebijakan pemerintah dalam hal ini sebagai cara untuk mengelola keuangan negara yang digunakan untuk menunjang perekonomian nasional, produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja dan stabilitas harga. Keuangan negara dalam hal ini sebagai sarana untuk mewujudkan sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kestabilan pendapatan. Berdasarkan definisi tersebut kebijakan fiskal secara langsung dapat

mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Alat kebijakan fiskal yang biasa diterapkan dalam intervensi sektor riil antara lain pendapatan, belanja dan neraca anggaran. Pemerintah dalam pelaksanaannya menyesuaikan siklus bisnis yang sedang berjalan sehingga kebijakan fiskal yang ditetapkan dapat menstabilkan kondisi sektor riil di negara (Fitriani, 2020).

Terdapat kontra mengenai kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menstabilkan situasi di sektor riil dengan cara menerapkan kebijakan tanpa memperhatikan siklus bisnis. Dikarenakan kebijakan fiskal dalam hal ini dibagi menjadi *procyclical* (mengurangi pengeluaran) dan *countercyclical* (meningkatkan pajak publik) selama terjadinya resesi. Kebijakan fiskal yang ditetapkan harus memiliki perilaku *countercyclical* jika mengacu pada teori ekonomi, namun pada kenyataannya perilaku tersebut tidak terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi di suatu negara termasuk tekanan politik dan hilangnya akses pasar internasional (sesuai dengan kondisi negaranya). Woo (2005) dalam Fitriani (2020) kebijakan fiskal memiliki pengaruh *procyclical* banyak terjadi di negara berkembang sedangkan negara maju memiliki perilaku *countercyclical*.

Negara membutuhkan sumber pendapatan untuk menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat berupa fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Penyesuaian bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah bertujuan menstabilkan perekonomian yang mengarah pada kondisi lebih baik melalui belanja negara dengan cara mengubah pengeluaran (*expenditure policy*) dan penerimaan perpajakan (*tax policy*) yang berasal dari pengeluaran wajib pajak kepada pemerintah. Kebijakan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal penting yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan mobilisasi pendapatan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan ekonomi. Demikian halnya sistem perpajakan sebagai sumber utama untuk membiayai pendapatan publik dalam pembangunan ekonomi didasarkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat yang dihasilkan dari mobilisasi sumber daya dalam negeri.

Beberapa negara saling berkompetisi untuk meningkatkan kebutuhan warga negaranya, namun terdapat keterbatasan sumber daya yang dapat dilakukan. Keadaan tersebut diperkuat oleh tingginya kenaikan biaya pelayanan publik yang sulit dipertahankan disetiap tahunnya, sisi lain adanya tekanan opini publik untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik melalui kebijakan publik yang efisien. Hal ini perlu dilakukan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang mampu menghasilkan pembiayaan atau penerimaan yang maksimal. Demikian *instrument* kebijakan fiskal pada sektor perpajakan di suatu negara merupakan hal penting untuk dimaksimalkan (Boukbech, et.al, 2018).

Benua ASIA sebagai benua terbesar yang ada di dunia dengan luas wilayahnya sekitar 43-44 juta kilometer persegi. Kawasan benua ASIA secara geografis terdiri dari beberapa bagian seperti Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah dan Asia Selatan terdiri dari 39 negara. Sebagian besar negara berkembang di ASIA telah berpindah dari negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan menengah akibat pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi telah menjadi kunci suatu negara tetap stagnan dalam mempertahankan perekonomiannya, bahkan banyak negara berpenghasilan menengah stagnan pada level tertentu. Hal ini mengacu pada fenomena *middle-income trap* dimana pertumbuhan suatu negara melambat setelah produk domestik bruto perkapita mencapai tingkat pendapatan

menengah sehingga perpindahan ke tingkat pendapatan tinggi sulit dicapai (ADB, 2018).

Beberapa peneliti seperti Felipe (2012) dan Aiyar (2013) dalam ADB (2018) menggunakan klasifikasi kelas pendapatan negara yang diperbarui setiap tahun oleh Bank Dunia atau *The Worldbank Group*. Klasifikasi pendapatan negara (*income country*) dibedakan menjadi empat kategori pendapatan berdasarkan pendapatan nasional per kapita riil atau *Gross National Income Percapita* (GNI) US\$. Tabel 1.1 merupakan ambang batas pendapatan sebagaimana berikut ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Pendapatan Negara

Group	July 1, 2019
Low Income	< 1,026
Lower-Middle Income	1,026 - 3,995
Upper-Middle Income	3,996 - 12,375
High Income	> 12,375

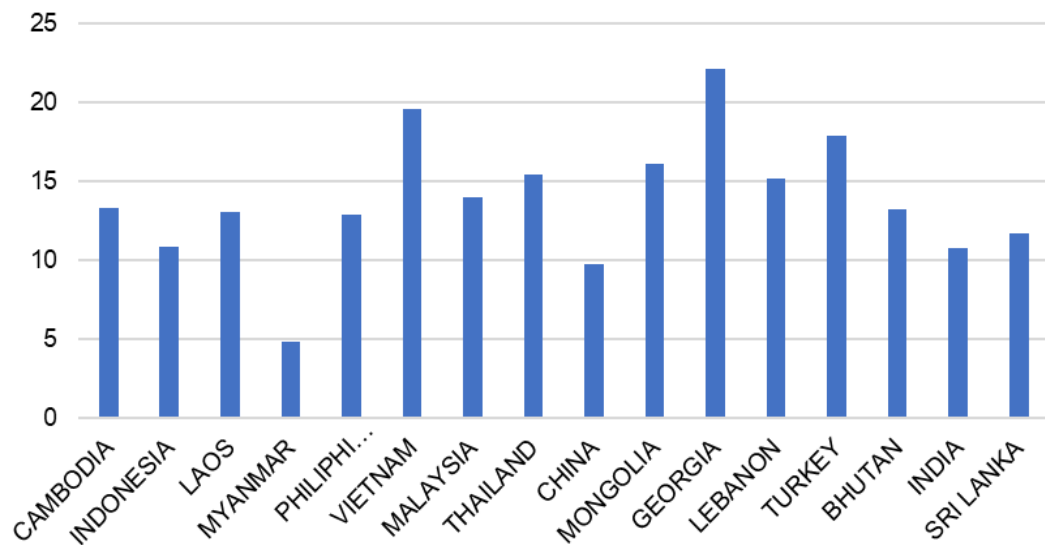
Sumber: World Bank, 2020

Worldbank (2013) dalam ADB (2018) menemukan bahwa negara Amerika Serikat sebagai negara referensi dari kisaran pendapatan perkapita negara lain. Beberapa negara menjadikan tujuan utama pembangunan negara kurang berkembang untuk mencapai standar hidup yang sebanding dengan ekonomi negara maju. Sebagian besar negara di Kawasan ASIA masih berada pada tingkat pendapatan rendah hingga menengah atau sering disebut dengan *low income* dan *middle income* berdasarkan nilai *Gross National Income* (GNI) *Percapita*. Negara dengan klasifikasi pendapatan rendah hingga menengah saling berkompetisi untuk meningkatkan pendapatan negara disetiap tahunnya. Meningkatnya kinerja penerimaan pajak sangat dibutuhkan dikarenakan biaya kebutuhan layanan,

keberlanjutan utang negara, serta masih minimnya tingkat investasi yang masuk dalam penerimaan negara.

Mobilisasi penerimaan pajak negara berpendapatan menengah dan berpendapatan rendah merupakan fokus pemerintah yang cukup besar. Ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan luar negeri dalam jangka panjang mengarahkan negara untuk melakukan pinjaman/hutang ke negara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak agar tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Sehingga hutang kepada luar negeri dapat dibatasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Negara yang berpenghasilan rendah dan menengah dapat dipulihkan dengan penerimaan pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari pajak langsung (pajak atas pendapatan dan laba) dan pajak tidak langsung (pajak cukai dan pajak pertambahan nilai atau penjualan). Penerapan sistem perpajakan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan pajak di negara berkembang. Demikian penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah di berbagai negara.

Sistem perpajakan di negara berpendapatan rendah hingga menengah membutuhkan implementasi reformasi pajak untuk meningkatkan hubungan antara administrasi perpajakan dan wajib pajak dalam kebijakan publik, serta perlu adanya analisis faktor yang menentukan kapasitas penerimaan negara. Romer (2010) menunjukkan bahwa perpajakan merupakan kunci utama untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Kontribusi wajib bagi badan atau orang pribadi kepada negara yang dilandasi oleh peraturan negara tanpa adanya paksaan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.



Gambar 1.1 Persentase Rata-Rata Tax Revenue Low Income dan Middle Income di ASIA Selama 2008-2019

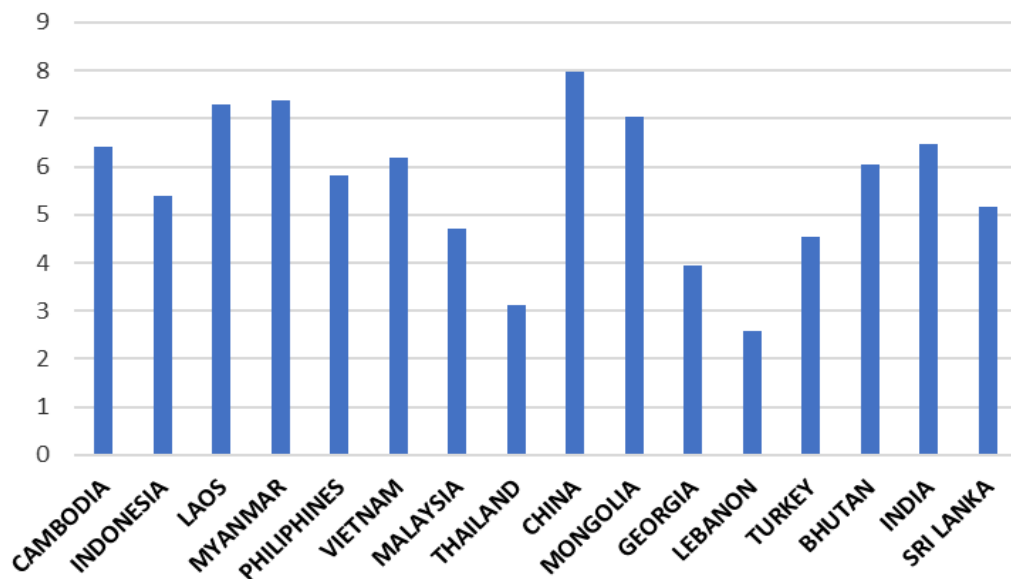
Sumber: Worldbank Data (2019), diolah

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara bagi program pembangunan nasional, sehingga kemandirian dalam pembiayaan negara dapat tercapai. Persentase penerimaan pajak di beberapa negara di ASIA pada tahun 2008 hingga tahun 2019, negara Myanmar merupakan rata-rata penerimaan pajak terendah sedangkan rata-rata penerimaan pajak tertinggi terdapat pada Negara Georgia hal ini tersaji pada Gambar 1.1. Penerimaan negara sudah ditargetkan oleh pemerintah, namun realisasi penerimaan pajak jauh dari target selama satu tahun, sehingga pemerintah terus berupaya untuk menggali berbagai sumber pendapatan agar penerimaan negara dapat meningkat. Kegiatan ekonomi yang pesat didukung oleh stabilitas kondisi politik dan sosial memberikan peluang bagi pemerintah untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan negara dengan cara mentargetkan penerimaan pajak.

Penerimaan pemerintah sektor perpajakan dalam PDB (*Product Domestic Bruto*) dapat terjadi fluktuasi di setiap tahunnya, dikarenakan terjadi defisit fiskal

pada harga komoditas yang lebih rendah serta impor lebih lambat (Worldbank, 2019). Penurunan pertumbuhan ekonomi negara diperkirakan terjadi ketegangan dalam perdagangan internasional akibat ketidakpastian politik dalam negeri. Pertumbuhan penerimaan pajak di suatu negara terjadi fluktuasi dan mengalami penurunan diakibatkan prospek ekonomi global yang lebih lemah dengan kondisi pembiayaan yang ketat, serta adanya perketatan perdagangan yang berkelanjutan, sehingga banyak negara berkembang mengalami tekanan pasar keuangan.

Penerimaan perpajakan diharapkan meningkat melalui serangkaian reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, efisiensi, dan kesederhanaan sistem perpajakan menuju sistem tarif rendah dan berbasis luas (Worldbank, 2019). Meningkatkan penerimaan pajak harus sejalan dengan peningkatan pelayanan publik sehingga tidak memacu ketidakpuasan publik lebih lanjut. Adanya ruang fiskal digunakan untuk melakukan investasi lebih tinggi dalam modal fisik serta mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif. Eluyela (2018) dalam Oladipo (2019) menemukan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan ekonomi di negara berkembang melalui pendapatan yang dihasilkan secara internal melalui pajak yang dapat membantu pemerintah dalam menyediakan dana untuk memenuhi infrastruktur yang berkelanjutan.



Gambar 1.2 Rata-rata Pertumbuhan GDP Negara *Low Income* dan *Middle Income* di ASIA (annual %) Selama 2008-2019

Sumber: Worldbank Data (2019), diolah

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting untuk melakukan analisis pembangunan di suatu negara yang diukur menggunakan GDP (*Gross Domestic Product*). Negara dengan rata-rata persentase pertumbuhan GDP terendah yaitu negara Lebanon sedangkan rata-rata pertumbuhan GDP tertinggi yaitu negara China hal ini tersaji pada Gambar 1.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan semakin produktif dan kompetitif untuk melakukan kegiatan ekonomi. Negara berpendapatan rendah hingga menengah dituntut untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, akan tetapi terkendala keterbatasan dalam mobilisasi sumber daya diberbagai sektor. Keadaan tersebut diperkuat oleh tingginya kenaikan biaya pelayanan publik yang dikeluarkan pemerintah di setiap tahunnya. Pajak digunakan oleh pemerintah dalam menstabilkan dan mempromosikan ekonomi yang bertujuan untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan pada berbagai sektor perekonomian.

Pemerintah negara berpendapatan rendah dan menengah menerapkan berbagai strategi untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Sektor industrialisasi dipersiapkan sebagai sektor penggerak dan pemimpin (*the leading sector*) negara terhadap perkembangan sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan sektor industri yang semakin pesat dapat merangsang pertumbuhan sektor pertanian dalam menyediakan bahan baku serta dapat mengembangkan sektor jasa lain dalam proses industrialisasi (Purnomo, 2008).

Penelitian ini menganalisis determinan penerimaan pajak negara *low income* dan *middle income* di ASIA. Khususnya untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi seperti Manufaktur, Pertanian, Perdagangan Internasional, Pertumbuhan penduduk, Pendapatan perkapita, serta inflasi. Salah satu faktor yang menentukan penerimaan pajak dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase kontribusi dalam PDB yang dinilai pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya.

Hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh teori yang dikemukakan Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (1993). Adanya perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian mengakibatkan pengeluaran pemerintah akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya *Gross Domestic Product* (GDP) menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar pula. Determinan penerimaan pajak dalam makroekonomi menjadi sumber penerimaan untuk melakukan pembayaran pajak sebagai wajib pajak. Tinggi rendahnya penerimaan pajak negara mengimplikasikan kuat lemahnya sistem perpajakan di suatu negara.

Meningkatnya sektor industri manufaktur dapat dikategorikan sebagai prioritas dan strategis dalam menopang perekonomian di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kawasan industri telah menunjukkan adanya penarikan aliran modal investasi yang digunakan untuk penunjang industri yang berkelanjutan. Kontribusi sektor industri memberikan nilai tambah terbesar diantara sektor lainnya sejalan dengan meningkatnya permintaan produk barang setengah jadi atau produk barang jadi baik ditingkat internasional maupun domestik. Semakin tingginya jumlah permintaan produk dari sektor industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengeluaran negara. Peningkatan penerimaan pajak merupakan adanya relaksasi kebijakan investasi pada sektor industri sehingga jumlah penerimaan pajak semakin meningkat.

Tingkat produktivitas sektor industri dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk (*Growth Population*) yang berkontribusi dalam kegiatan produksi sebagai tenaga kerja perusahaan yang produktif. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang sebanding dengan kapasitas perusahaan dapat meningkatkan pendapatan perkapita (*Gdp Percapita*). Perbedaan ukuran perusahaan serta jumlah yang dibayarkan tergantung pada kinerja perusahaan. Industri manufaktur dengan nilai output produksi tinggi dan tingkat laba yang tinggi dapat dikenakan wajib pajak, bagi industri informal atau kecil dapat terhindar dari beban pajak karena output dan laba yang didapatkan lebih kecil (Yoke, 2018). Penerimaan pajak mengalami peningkatan secara konsisten merupakan penggambaran bahwasanya jumlah output produksi yang dihasilkan oleh sektor industri semakin meningkat.

Ketidakpastian kebijakan global, perdagangan internasional serta pertumbuhan ekonomi global menyebabkan pertumbuhan ekspor suatu negara akan tertahan. Hal tersebut terdapat beberapa jalur untuk meningkatkan ekspor lebih tinggi. Perusahaan dapat melakukan *trade oppenes* atau perdagangan internasional antar negara ketika output produksi yang dihasilkan semakin meningkat serta telah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam negeri. Produsen dalam negeri dalam hal ini dapat melakukan ekspor (*Export*) barang jadi kepada negara lain untuk melakukan kerjasama perdagangan. Sektor industri dapat mengalami penurunan output yang disebabkan penerapan suku bunga dan pajak yang diberlakukan lebih tinggi, serta kurangnya pemanfaatan pajak yang efektif dalam penyediaan fasilitas infrastuktur untuk proses produksi. Peningkatan jumlah realisasi penerimaan perpajakan di negara berkembang serta tingginya indeks produksi manufaktur yang semakin meningkat maka penerimaan pajak dari industri manufaktur didasarkan pada jumlah output produksi perusahaan yang dihasilkan.

Inflasi disuatu negara akibat dari kecenderungan harga yang menaik secara terus menerus dalam satu periode (Mankiw, 2006: 145). Meningkatnya kebutuhan warga negaranya dan terbatasnya sumber daya menjadi tantangan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah. Keadaan tersebut diperkuat oleh tingginya biaya pelayanan publik yang sulit dipertahankan, terutama dalam pembatasan pungutan pajak dan disisi lain tekanan oleh opini publik yang menuntut penggunaan dana publik melalui kebijakan publik yang efisien. Konteks tersebut ditandai dengan tidak terbatasnya kebutuhan, sedangkan kebijakan publik memerlukan mobilisasi sumber daya yang berbeda agar dapat

melaksanakan suatu kebijakan yang mampu menghasilkan pembiayaan yang maksimal.

Hubungan antar variabel ekonomi makro dan penerimaan pajak juga banyak diteliti di beberapa negara, salah satunya studi yang dilakukan oleh Penelitian Gupta (2007) melakukan penelitian dalam kurun 25 tahun di 105 negara berkembang yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi rasio pajak antara lain PDB (pendapatan) perkapita, output sektoral berpengaruh secara signifikan dan positif sebagai faktor penentu kinerja pendapatan negara. *Trade openness* atau tingkat perdagangan internasional, bantuan berpengaruh positif dan signifikan dan hutang yang berasal dari luar negeri tidak berpengaruh secara signifikan, tingkat ekonomi formal dan faktor institusional (korupsi dan stabilitas politik negara). Korupsi tidak memiliki hubungan signifikan terhadap penerimaan negara. Stabilitas politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja pendapatan negara namun hanya untuk spesifikasi tertentu.

Penelitian Boukbech (2018) menunjukkan bahwa PDB Perkapita dan nilai tambah pertanian berkorelasi positif dan signifikan dengan penerimaan pajak. Derajat keterbukaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Penelitian Bouckbech dilakukan di 29 negara berkembang atau *lower middle income* pada tahun 2001-2004. Eltony (2002) dilakukan di negara Arab pada tahun 1999-2000 menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam PDB, pertambangan dan pangsa ekspor berhubungan secara negatif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak. Sedangkan pangsa impor dan pendapatan perkapita berkorelasi secara positif dengan taraf signifikansi 10%. Sektor

manufaktur dalam PDB serta hutang luar negeri secara konsisten tidak berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menggunakan penelitian Boukbech (2018) sebagai acuan utama penelitian ini. Terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus negara berpendapatan rendah dan menengah di ASIA serta perbedaan dalam rentang waktu penelitian. Penambahan satu variabel makro ekonomi dalam penelitian diharapkan mendapat hasil yang lebih akurat yaitu sektor industri manufaktur. Penelitian di ASIA mengenai penerimaan pajak terutama negara berpendapatan rendah dan menengah masih jarang dilakukan sehingga penelitian ini menarik serta dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan ekonomi di ASIA terutama mengenai sektor perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Adapun pemaparan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak negara dengan kategori negara yang berpendapatan rendah dan menengah dalam pembangunan ekonomi di ASIA, sehingga paparan tersebut dapat diambil judul “Analisis Determinan Penerimaan Pajak Negara *Low Income* dan *Middle Income* di ASIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan negara yang berasal dari perpajakan di negara berpendapatan rendah dan negara berpendapatan menengah merupakan kontribusi utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penerapan pajak yang diberlakukan di negara berpendapatan rendah dan menengah di ASIA kurang memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemerataan masyarakat. Perkembangan sektor industri manufaktur di negara berpendapatan rendah dan

menengah di ASIA menjadi kontribusi utama dalam pendapatan negara. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang menjadi dasar peneliti adalah, Bagaimana Determinan Penerimaan Pajak Negara *Low Income* dan *Middle Income* di ASIA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Determinan Penerimaan Pajak Negara *Low Income* dan *Middle Income* di ASIA.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara rinci dibagi menjadi dua kategori yaitu aspek akademik dan aspek praktis. Kedua aspek manfaat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, wawasan serta referensi yang relevan bagi ilmu ekonomi mengenai kebijakan fiskal dan faktor makro ekonomi lainnya untuk meningkatkan penerimaan negara. Penemuan ini dapat dijadikan bahan pengembangan teoritik atau dijadikan bahan kajian untuk mengkaji beberapa teori yang selama ini telah terakumulasi, sehingga dapat menemukan penelitian ilmiah yang lebih produktif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi yang berkaitan dengan perkembangan berbagai sektor ekonomi (pertanian, industri dan perdagangan) dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita) yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Bagi

masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai sumber pengetahuan berbagai faktor yang memiliki kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Bagi pemerintah dan para pengambil keputusan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, diharapkan menjadi bahan masukan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Determinan Penerimaan Pajak Negara *Low Income* dan *Middle Income* di ASIA.